

ISLAMIC ACCOUNTING

SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH

Ditulis oleh Nurul Fauziyyah
Bersumber pada: Yaya, Rizal, dkk..(2009). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

-----PENGARUH ISLAM TERHADAP PERKEMBANGAN AKUNTANSI

Sebelum berdirinya pemerintahan islam, peradaban didominasi oleh dua bangsa besar yang memiliki wilayah yang luas, yaitu bangsa Romawi dan bangsa Persia. Sebagian besar daerah di Timur Tengah saat Nabi Muhammad SAW lahir berada dalam jajahan dan menggunakan bahasa Negara jajahan seperti Syam (sekarang meliputi Siriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan Israel) yang dijajah oleh Romawi, sedangkan Irak dijajah oleh Persia. Adapun perdagangan bangsa Arab Mekkah terbatas ke Yaman pada musim dingin dan Syam pada musim panas.

Pada saat itu, akuntansi telah digunakan dalam bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang sejak mulai berdagang sampai pulang kembali (Adnan dan Labatjo, 2006). Perhitungan dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan, dan untung rugi. Selain itu, menurut Syahatah (2001), orang-orang Yahudi, pada saat itu banyak melakukan perdagangan menetap dan juga telah memakai akuntansi untuk transaksi utang piutang mereka.

Praktik akuntansi pada masa Rasulullah mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai (Al-Baqarah: 282) dan untuk membayar zakat (Al-Baqarah: 110, 117). Perintah Allah untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai telah mendorong setiap individu untuk senantiasa menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi. Adapun perintah Allah untuk membayar zakat telah mendorong umat islam saat itu untuk mencatat dan menilai aset yang dimilikinya. Berkembangnya praktik pencatatan dan penilaian aset merupakan konsekuensi logis dari ketentuan pembayaran zakat yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari aset yang dimilikinya yang telah memenuhi kriteria nisab dan haul.

-----PRAKTIK AKUNTANSI PEMERINTAH ISLAM

Kewajiban zakat berdampak pada didirikannya institusi *Baitulmaal* oleh Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai lembaga penyimpanan zakat beserta pendapatan lain yang diterima oleh negara. Hawarin (1989) dalam Zaid (2001) mengungkapkan bahwa perintah Rasulullah memiliki 42 pejabat yang digaji yang terspesialisasi dalam peran dan tugas sendiri. Adnan dan Labatjo (2006) memandang bahwa praktik akuntansi pada masa Rasulullah baru berada pada tahap penyimpanan personal yang menangani fungsi-fungsi lembaga keuangan Negara. Pada masa tersebut, harta kekayaan yang diperoleh Negara langsung didistribusikan setelah harta tersebut diperoleh. Dengan demikian, tidak terlalu

diperlukan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran *Baitulmaal*. Hal sama berlanjut pada masa Abu Bakar As-Shiddiq.

Perkembangan pemerintahan islam hingga meliputi Timur Tengah, Afrika, dan Asia di zaman Khalifah Umar bin Khattab telah meningkatkan penerimaan Negara secara signifikan. Dengan demikian, kekayaan Negara yang disimpan di *Baitulmaal* juga semakin besar. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Negara. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab mendirikan unit khusus yang bernama *Diwan* yang bertugas membuat laporan keuangan *Baitulmaal* sebagai bentuk akuntabilitas *Khalifah* atas dana *Baitumaal* yang menjadi tanggung jawabnya (Zaid, 2001).

Selanjutnya, reliabilitas laporan keuangan pemerintahan dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (681-720 M) berupa praktik pengeluaran bukti penerimaan uang. Kemudian, Khalifah Al Waleed bin Abdul Malik (705-715 M) mengenakan catatan dan register yang terjilid dan tidak terpisah seperti sebelumnya (Layin, 1973, dalam Zaid, 2001).

Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa *Daulah Abbasiah*. Akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi, antara lain akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku (*auditing*) (Zaid, 2001). Pada masa itu, sistem pembukuan telah menggunakan model buku besar, yang meliputi sebagai berikut.

1. *Jaridah Al-Kharaj* (mirip *receivable subsidiary ledger*) merupakan pembukuan pemerintah terhadap piutang pada individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta hewan ternak yang belum dibayar dan cicilan yang telah dibayar (Lasyin, 1973, dalam Zaid 2001). Piutang dicatat di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain.
2. *Jaridah An-Nafaqat* (jurnal pengeluaran) merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran Negara.
3. *Jaridah Al-Maal* (jurnal dana) merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat.
4. *Jaridah Al-Musadareen* merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan denda atau sita dari individu yang tidak sesuai syariah, termasuk dari pejabat yang korup.

-----HUBUNGAN PERADABAN ISLAM DENGAN BUKU PACIOLI

Pada tahun 1494, seorang berkebangsaan Italia bernama Luca Pacioli, menerbitkan buku dengan judul *Summa de Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita* (segala sesuatu tentang Aritmatika, Geometrika, dan Proporsi). Buku tersebut terbagi atas lima bagian yang banyak membahas tentang ilmu matematika. Salah satu bab di dalamnya membahas tentang pembukuan yang menekankan pada sistem pencatatan yang terjadi di Venice lebih dari 200 tahun sebelumnya dan masih digunakan pada masa itu, dan dikenal dengan nama metode Venice (Adnan dan Labatjo, 2006).

Melalui buku tersebut, Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas sistem tata buku berpasangan (*double entry bookkeeping*), sebuah sistem baru dan dianggap sebagai revolusi dalam bidang ekonomi dan bisnis. Henderiksen (2000), menyatakan bahwa jurnal yang dibuat oleh Pacioli sudah mirip dengan yang digunakan sekarang. Debit dicatat di sebelah kiri (*deve dare* atau *debere*) dan kredit di sebelah kanan (*deve avere* atau *creed*). Dalam berbagai literatur, Pacioli dikenal dengan "Bapak Akuntansi."

Adnan dan Labatjo (2006) menyatakan bahwa buku Pacioli menimbulkan banyak pertentangan di kalangan peneliti yang meneliti tentang sejarah akuntansi, Have (1976) dalam Zaid (2001) beranggapan bahwa perkembangan akuntansi sebagaimana dituliskan oleh Pacioli tidaklah terjadi di Republik Italia kuno. Menurut Have (1976) dalam Zaid (2001), yang terjadi adalah Italia mengetahui tentang akuntansi dan ilmu itu sampai pada mereka dari bangsa lain. Zaid (2001) menyatakan bahwa bab dalam buku Pacioli tentang akuntansi hanyalah bagian dari apa yang ada pada saat itu, yang beredar di antara para guru dan murid sekolah aritmatika dan perdagangan. Dengan demikian, Pacioli bukanlah penemu, melainkan pencatat terhadap apa yang beredar saat itu (Zaid, 2001). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Belkaoui (2000), bahwa Pacioli bukanlah penemu *double entry book keeping*, melainkan hanya menjelaskan apa yang telah dipraktikkan pada masa itu.

-----PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

1. Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah

Al-Quran sebagai sumber hukum dalam agama islam cukup banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan keuangan. Akan tetapi, Al-Quran tidak secara spesifik berbicara tentang bentuk lembaga keuangan. Pembahasan Al-Quran lebih berkaitan dengan akhlak dan etika yang berkaitan dengan masalah keuangan, antara lain menjaga kepercayaan (*amanah*), keadilan (*'adalah*), kedermawanan (*ikhshan*), perintah menjauhi yang haram dan menegakkan yang baik (*amar ma'ruf nahi munkar*), dan teguran (*tawsiyah*). Lembaga keuangan syariah yang berwujud dalam sebuah institusi adalah ketika Rasulullah SAW mendirikan *Baitulmaal* saat pemerintahan Islam dibentuk di Madinah. *Baitulmaal* di zaman Rasulullah merupakan lembaga penyimpanan kekayaan Negara. Pada saat itu, *Baitulmaal* memiliki fungsi menerima pendapatan dan mengeluarkan pembelanjaan Negara.

Pada masa *Khulafaurrasyidin*, *Baitulmaal* berkembang dalam hal jumlah kekayaan yang dikelola dan fungsi yang dijalankan. Lembaga ini kemudian dikembangkan secara administrasi dan dibentuk dewan-dewan untuk ketertiban administrasi. Selanjutnya, mulai *Dinasti Abbasyiah* fungsi *Baitulmaal* bertambah dengan mengeluarkan kebijakan moneter. Hingga pada saat runtuhnya *Dinasti Usmaniah* di Turki, nama *Baitulmaal* tidak muncul lagi sebagai pusat pengaturan fiskal dan moneter Negara.

2. Lembaga Keuangan Syariah Modern

Pada tahun 1963, di desa Mit Ghamr, salah satu daerah di wilayah Mesir, dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama *Mit Ghamr Savings Bank/ Mit Ghamr Bank* yang dipelopori oleh seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El-Najjar. Lembaga keuangan tersebut ternyata sangat sukses, baik dalam penghimpunan modal dari masyarakat berupa tabungan, uang titipan dan zakat, shadaqah, dan infak, maupun dalam memberikan modal kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama di bidang perdagangan dan industri. Dalam operasinya, *Mit Ghamr Bank* tidak membebankan bunga pada peminjam maupun membayar bunga kepada penabung. Bank ini melakukan investasi secara langsung maupun dalam bentuk kemitraan dengan pihak lain dan selanjutnya membagi keuntungan dengan para penabung. Keberhasilan *Mit Ghamr Bank* menginspirasi banyak pihak untuk melakukan hal yang sama, antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Mesir dibawah pemerintahan Gamal Abdul Naser membentuk *Naser Sosial Investment* dengan basis perkotaan pada 1972.
2. Masyarakat cendikiawan dan professional di Filipina membentuk Bank Amanah pada tahun 1973.
3. Organisasi Konferensi Islam (OKI) ang beranggotakan pemerintah berbagai Negara berpenduduk muslim mendirikan *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1973 dan mulai beroperasi pada tahun 1975 yang berkantor di Jeddah.
4. Setelah IDB beroperasi, berbagai bank syariah tumbuh dan berkembang di berbagai Negara termasuk Indonesia dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992.